



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
UNIT KERJA : PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TUKIRIN
2. Jabatan : AUDITOR MADYA
3. NHK : 51175

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/135 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 210.500.000

1. MOTOR, SUZUKI FD110 Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, HONDA NF11CIC MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA NF 125TR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, HONDA NF 125 TD Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
5. MOBIL, DAIHATSU XENIA R Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 163.133

F. HARTA LAINNYA Rp. 50.000.000

Sub Total Rp. 1.161.863.133

III. HUTANG Rp. 873.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 288.863.133

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.